

# Pengaruh *Local Taxing Power (LTP)* terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat

Oleh

**Fajri Muharja**

Departemen Ekonomi FEB Universitas Andalas

Email: [fajrimuharja@eb.unand.ac.id](mailto:fajrimuharja@eb.unand.ac.id)

Bayu Setiawan Yuniarto

Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Email: [bayusy@kemenkeu.go.id](mailto:bayusy@kemenkeu.go.id)

Abdullah Al Mizan

Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Email: [abdullah.almizan@kemenkeu.go.id](mailto:abdullah.almizan@kemenkeu.go.id)

Marsandhi Evan Dino Pardede

Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Email: [marsandhi.evan@kemenkeu.go.id](mailto:marsandhi.evan@kemenkeu.go.id)

## Abstract

*Local Taxing Power (LTC)* merupakan salah satu teknik yang dapat menjelaskan keterkaitan kinerja fiskal daerah dengan kondisi produktivitas ekonomi yang ada di daerah bersangkutan. *Tax-ratio* belum mampu menjawab keterkaitan tersebut, karena *tax ratio* nilainya adalah berbasis kewenangan daerah dalam pengelolaan pajak. Kajian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh nilai pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, kota, provinsi dan pusat yang ada di masing-masing daerah kabupaten di Sumatera Barat dan melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Dengan menggunakan data kemiskinan dari BPS (2017-2023) dan Nilai pajak lokal dan pusat dari DJPb (2017-2023) memperlihatkan pajak yang dikelola kabupaten dan kota serta pajak provinsi mempengaruhi penurunan kemiskinan yang signifikan di kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

*Kata Kunci: Local Taxing Power (LTP), Kemiskinan, Pajak, retribusi*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dalam konteks ekonomi regional dan global memiliki tujuan yang saling terkait. Pemerintah daerah berusaha untuk melakukan integrasi strategi menghadapi globalisasi dengan kekuatan lokal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi secara



berkelanjutan. Globalisasi memberikan tantangan dan peluang yang membutuhkan adaptasi pada tingkat daerah guna meningkatkan daya saing, pemanfaatan keterbukaan pasar, percepatan transformasi digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), mengintegrasikan perekonomian daerah dengan rantai ekonomi global, dan mendukung perekonomian berkelanjutan. Sedangkan dalam konteks ekonomi regional, perekonomian daerah diperlukan dalam rangka penguatan konektivitas dan sinergi antar wilayah dengan tujuan mengurangi ketimpangan antar daerah, mengoptimalkan keunggulan komparatif daerah, menyatukan daerah ke dalam perekonomian nasional dan global, membangun ketahanan perekonomian, dan meningkatkan kolaborasi regional. Artinya pembangunan perekonomian daerah saat ini adalah dalam rangka menciptakan keseimbangan dalam daya saing global dan konektivitas lokal. Hal ini jelas membutuhkan kekuatan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah untuk menciptakan ketangguhan, inklusivitas dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan nasional.

Memasuki masa 25 tahun kebijakan desentralisasi di Indonesia, salah satu instrumen yang dapat memberikan analisis terhadap tingkat ketangguhan perekonomian daerah adalah adanya kewenangan dalam mengelola penerimaan daerah. Hal ini bertujuan untuk menilai kinerja kemandirian ekonomi yang berbasis kekuatan lokal, kinerja aparatur pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otoritas daerah dalam pengelolaan penerimaan yang disebut dengan *Local Taxing Power* dapat memberikan ruang kemandirian fiskal bagi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun keberhasilan kemampuan ini tidak terlepas dari kapasitas dan kompetensi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan belanja daerah secara efektif, transparan dan berkeadilan.

Secara teori-ekonomi, *Local Taxing Power (LTP)*, memiliki keterkaitan dengan erat dengan perekonomian daerah. LTP dapat dijadikan sebagai proksi terhadap kemampuan dalam mengelola sumber daya daerah secara ekonomis, efektif dan efisien, adanya Insentif terhadap investasi, akuntabilitas dan responsivitas pemerintah dalam menyejahterakan

masyarakat. *LTP* merupakan bagian dari desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunan. Pada dasarnya pemerintah daerah dapat melakukannya secara fleksibel dan responsif dalam pengalokasian sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Berkenaan dengan permasalahan keadilan dan pemerataan, *LTP* dapat membantu dalam pengurangan kesenjangan ekonomi dan permasalahan sosial di daerah.

Secara empiris, berbagai kajian belum secara spesifik melakukan analisis keterkaitan antara LTP dengan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa literatur empiris yang ada menemukan bahwa keterkaitan pajak dengan perekonomian di Indonesia antara lain dijelaskan oleh (Hadiyatno et al., 2020) (Haldenwang, 2015) (Rifai & Priono, 2022) (Akbar et al., 2019) (Dewi & Budhi, 2018) (Asari & Suardana, 2018) (Meiryani et al., 2022)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU-HKPD) secara signifikan memberikan perubahan terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia. UU-HKPD memiliki tujuan untuk membangun hubungan keuangan yang harmonis, adil, dan akuntabel antara pemerintah daerah dan pusat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, HKPD dapat memberikan penguatan terhadap desentralisasi fiskal dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah dengan penataan ulang terhadap sistem transfer ke daerah yang lebih fleksibel dalam pengelolaan penganggaran. Di samping itu, HKPD mendorong untuk memprioritaskan belanja yang produktif dengan berorientasi pada hasil dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. HKPD juga hadir untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Hal ini jelas dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Daerah secara aktif dan kreatif dapat menggali potensi pendapatan daerah dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian dan pariwisata di Indonesia. Namun dalam satu dan dua dekade terakhir, posisi perekonomian makro daerah ini mengalami perlambatan secara nasional dan regional di Sumatera. Jika menggunakan beberapa indikator makroekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, stabilitas ekonomi, dan ketimpangan antar wilayah memperlihatkan kinerja yang menurun dan saat ini berada di papan tengah di pulau Sumatera. Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita riil (PDRB-HK per Kapita Sumatera Barat berada mengelompok pada provinsi yang berpendapatan menengah di Sumatera. Daerah ini juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan daerah lain. Daerah ini membutuhkan interaksi sektor ekonomi guna melahirkan dan mendapatkan sumber-sumber ekonomi baru dalam menyejahterakan masyarakat.

Aspek ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat memiliki permasalahan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi kedua setelah Kepulauan Riau dan provinsi lain di Sumatera. Persentase pekerja formal yang ada di Sumatera Barat baru sepertiga dari total pekerja yang ada. Nilai persentase pekerja formal ini adalah di bawah rata-rata nasional. Permasalahan ketenagakerjaan di Sumatera Barat ini tidak terlepas dari kondisi dalam 1-2 dekade terakhir terjadinya de-industrialisasi yang prematur.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal berupa *Local Taxing Power (LTP)* terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Sumatera Barat. Ruang lingkup kajian ini adalah menganalisis berbagai penerimaan pemerintah, baik kota dan kabupaten, provinsi, maupun penerimaan pemerintah pusat yang telah dilakukan di region bersangkutan. Sistematika penulisan kajian ini selanjutnya adalah menjelaskan tinjauan teoritis dan empiris, menjelaskan hipotesis, dan analisis terhadap *economics framework*. Bagian berikutnya kajian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penggunaan data dan teknis analisis yang diperlukan. Selanjutnya, menjelaskan temuan dan analisis serta kebutuhan kebijakan yang diperlukan.

Kebaharuan kajian ini menemukan keterkaitan dan relevansi *Local Taxing Power* (LTP) dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan lokus kajian adalah pada tingkat kabupaten dan kota. Selama ini *Taxing Power* (TP) dapat dijelaskan untuk kebutuhan analisis fiskal pemerintah pusat. Sebetulnya pada tingkat pemerintah Kota dan Kabupaten juga dapat dilakukan penilaian nilai LTP dengan menghitung dan menemukan informasi besaran pajak dan penerimaan daerah yang dikelola kabupaten dan kota, dan pajak dan penerimaan yang dikelola provinsi serta pemerintah pusat yang bersumber dari wilayah Kota dan Kabupaten bersangkutan.

## II. TINJAUAN LITERATUR

### 2.1. Kesejahteraan Masyarakat dalam Pembangunan Regional

Permasalahan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama yang diperlukan dalam pembangunan regional. Secara teoritis, kesejahteraan memiliki keterkaitan erat dengan teori Pertumbuhan Ekonomi Regional. Teori ini menjelaskan bahwa pentingnya pertumbuhan ekonomi merupakan faktor pendorong dalam peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan oleh Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat membuka lapangan kerja, pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Septianingrum et al., 2020; Suparta & Malia, 2020; Pangestu et al., 2022) 2023).

Guna mengantisipasi terjadinya permasalahan ketimpangan pembangunan di daerah. Secara teori dapat dijelaskan bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah dan faktor-faktor penyebabnya merupakan aspek penghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pada dasarnya kebijakan pembangunan regional bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah melalui pengembangan investasi, penguatan infrastruktur dalam mendorong kesejahteraan masyarakat (Ridho & Wijayanti, 2022; dan Septianingrum et al., 2020).

## **2.2. Kebijakan Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat**

Secara ekonomi, Kebijakan fiskal merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah melalui, pajak, pengeluaran publik. Pembiayaan hutang yang dapat memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan. Keterkaitan kebijakan fiskal dengan kemiskinan meliputi:

### **a. Redistribusi Pendapatan**

Kebijakan fiskal biasanya dapat digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen dalam penanggulangan ketimpangan pendapatan yang merupakan penyebab utama dari kemiskinan penduduk. Beberapa instrumen yang lazim digunakan antara lain adalah pajak progresif dan transfer tunai seperti halnya subsidi atau bantuan langsung tunai. Pajak progresif adalah sebuah kebijakan fiskal yang memberikan pajak lebih besar kepada warga negara yang berpendapatan tinggi dibanding kepada yang berpendapatan menengah dan rendah. Sehingga dana yang terkumpul dapat di-redistribusikan untuk penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya kebijakan fiskal lainnya adalah subsidi dan bantuan sosial. Pemerintah menggunakan hasil pajak ini kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi jumlah kemiskinan. Konsep ini dijelaskan dalam Model Redistribusi Keynesian dimana peningkatan pendapatan kelompok miskin dapat meningkatkan konsumsi agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### **b. Penyediaan Barang Publik dan Infrastruktur**

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, transportasi dan infrastruktur publik lainnya dapat menciptakan kesempatan ekonomi yang merata dari masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi endogen (Endogenous Theory) menjelaskan bahwa adanya investasi yang diberikan kepada sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat termasuk penduduk miskin. Hal ini pada gilirannya dapat mengeluarkannya dari kemiskinan. Beberapa contoh kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah adalah penyediaan pembangunan sekolah dan sarana kesehatan, subsidi pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

### **c. Stabilitas Kebijakan Makroekonomi dan Tenaga Kerja**

Kebijakan fiskal yang ekspansif yang salah satunya meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini dijelaskan dalam Teori Keynes yang menyatakan bahwa pentingnya pengeluaran pemerintah dalam mendorong permintaan agregat terutama dalam periode krisis. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran yang bisa berdampak kepada kemiskinan. Namun kebijakan tersebut harus diimbangi dengan keberlanjutan fiskal agar tidak terjadi inflasi atau utang publik yang berlebihan dan memperburuk kondisi perekonomian.

### **d. Efek Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi**

Hipotesis Trickle-Down Effect menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan secara tidak langsung. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadikan masyarakat miskin mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan. Kritik terhadap hipotesis ini menyatakan bahwa jika tidak adanya redistribusi yang efektif memberikan dampak bahwa manfaat perekonomian menjadi tidak merata dan memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, berbagai tantangan yang dapat menjadi hambatan kebijakan fiskal dalam mengentaskan kemiskinan adalah permasalahan korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan dana publik. Permasalahan berikutnya adalah kemampuan fiskal yang dimiliki daerah yang umumnya rendah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak yang rendah yang juga berdampak terhadap pengentasan permasalahan kemiskinan menjadi terbatas. Terakhir, ketergantungan terhadap subsidi dan bantuan sosial yang tidak disertakan dengan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat menciptakan ketergantungan dan memperparah siklus kemiskinan itu sendiri. Untuk itu, guna mewujudkan kebijakan fiskal yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan membutuhkan perencanaan yang tepat yang mengutamakan

redistribusi pendapatan, investasi terhadap barang publik, menciptakan stabilitas makroekonomi. Namun, tantangan mendasar yang dihadapi adalah efisiensi dalam mengimplementasikan kebijakan dan kebutuhan untuk mewujudkan keberlanjutan fiskal memerlukan kebijakan yang konkret dan memberikan manfaat dalam pengentasan kemiskinan.

### 2.3. Kajian Empiris Terdahulu

Beberapa kajian yang menjelaskan keterkaitan kebijakan fiskal terhadap perekonomian daerah sudah berkembang. Namun secara khusus menjelaskan tentang keterkaitan *Local Taxing Power* (LTP) masih terbatas. Secara empiris, literatur yang ada baru menjelaskan keterkaitan pajak dengan perekonomian di Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Hadiyatno et al (2020); Haldenwang (2015); Rifai & Priono (2022); Akbar et al. (2019); Dewi & Budhi (2018); Asari & Suardana (2018) dan Meiryani et al (2022). Keterbatasan utama yang dijelaskan dalam kajian-kajian di atas adalah besaran pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, kota ataupun provinsi belum dapat dijadikan cerminan capaian kinerja ekonomi terhadap sumber daya ekonomi yang ada di daerah bersangkutan.

Sebagai sebuah analisis dapat dijelaskan bahwa, UU No. 1 Tahun 2022 yang menjelaskan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU-HKPD) memberikan arah perubahan dari kebijakan sebelumnya yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi, penguatan terhadap prinsip keadilan, akuntabilitas dari pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan yang berorientasi kepada hasil capaian pembangunan. Capaian tersebut memberikan keleluasaan terhadap desentralisasi fiskal dalam pengelolaan sumber daya daerah dengan menghindari terjadinya kebijakan yang tumpang tindih.

Beberapa catatan penting yang semestinya dipahami oleh pemerintah sebagai otoritas fiskal baik di daerah maupun pusat adalah penggunaan rasio pajak terhadap PDRB sebetulnya belum menunjukkan gambaran kinerja fiskal terhadap perekonomian. Hal ini dikarenakan oleh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebuah ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Terlihat bahwa potensi pajak yang bernilai tinggi dengan basis sumber daya

alam dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintah Kota dan Kabupaten lebih mengelola pajak yang lebih berbasis jasa.

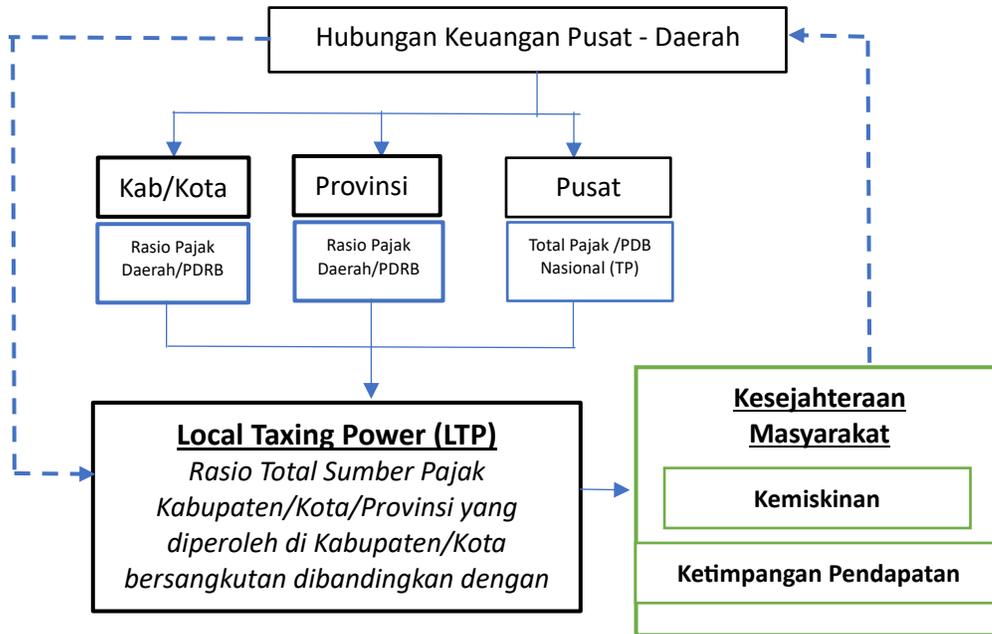
#### 2.4. Hipotesis dan Kerangka Konseptual Kajian

Berdasarkan studi literatur meliputi analisis terhadap teori yang menjelaskan dampak kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat dan studi empiris yang menjelaskan berbagai temuan perilaku fiskal daerah yang mempengaruhi tingkat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di berbagai kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia. Rumusan hipotesis yang dapat diberikan dalam kajian ini adalah:

- a. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara kebijakan fiskal daerah yang diwakili oleh *Local Taxing Power* (LTP) terhadap kesejahteraan (pengentasan kemiskinan) di Sumatera Barat.
- b. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pajak dan retribusi yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota terhadap kesejahteraan (pengentasan kemiskinan) di Sumatera Barat.
- c. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pajak dan retribusi yang dikelola pemerintah Provinsi terhadap kesejahteraan (pengentasan kemiskinan) di Sumatera Barat
- d. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pajak dan retribusi yang dikelola pemerintah Pusat terhadap kesejahteraan (pengentasan kemiskinan) di Sumatera Barat

Berdasarkan Studi literatur teoritis dan empiris, kerangka analisis ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 1.  
 Kerangka Analisis Ekonomi Pengaruh *Local Taxing Power* (LTP)  
 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat



Sumber: Gambar diolah

Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah bertujuan untuk memberikan perubahan dan arah dari kebijakan fiskal Indonesia yang harmonis, akuntabel dan berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indikator atau variabel yang lazim digunakan dalam menilai kinerja kemampuan fiskal daerah salah satunya adalah menggunakan *tax-ratio* baik di tingkat Kabupaten, kota, provinsi maupun secara nasional. Indikator ini memiliki kebiasaan karena pajak yang berlaku saat ini terutama di Kabupaten dan Kota merupakan kewenangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu ada jalan keluar untuk mencerminkan kinerja fiskal daerah dengan menggunakan variabel *Local Taxing Power* dari masing-masing daerah. Variabel tujuan yang digunakan dalam kajian ini adalah persentase kemiskinan dan *gini ratio* yang dapat dianggap sebagai keterwakilan dari kesejahteraan masyarakat.

### III. METODE

Kajian ini menjelaskan keterkaitan kebijakan fiskal di daerah dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kajian ini merupakan studi empiris yang bersifat kuantitatif dengan lokus riset adalah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Alasan utama provinsi ini dijadikan lokus penelitian dalam menjelaskan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan memperlihatkan bahwa provinsi Sumatera Barat relatif lebih baik dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Secara konsep, Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat adalah permasalahan dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Kemiskinan terjadi karena keterbatasan masyarakat akses terhadap sumber daya perekonomian yang merupakan dampak dari ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu dibutuhkan berbagai bentuk intervensi dari pemerintah melalui instrumen kebijakan ekonomi. Salah satunya adalah kebijakan fiskal dengan tujuan melakukan redistribusi pendapatan melalui mekanisme pajak daerah baik yang diperoleh langsung oleh kabupaten dan kota bersangkutan, pajak provinsi dan pajak pemerintah pusat di region kabupaten dan kota tersebut.

Secara operasional dapat didefinisikan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan variabel persentase kemiskinan ( $p_0$ ) yang merupakan jumlah penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan (GK) yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya. Sedangkan ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) merupakan ukuran yang menjelaskan perbedaan pendapatan masyarakat yang ada di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. 2) Variabel Kebijakan fiskal dalam kajian ini menggunakan 4 dimensi yaitu *local taxing power* (LTP) yang merupakan nilai persentase antara total perolehan pajak baik yang dikelola Kabupaten dan Kota, pajak provinsi maupun pajak pusat pada region kabupaten dan kota bersangkutan yang dibandingkan dengan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Harga Konstan di masing-masing Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat. Selanjutnya sebagai variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian adalah *dummy* variabel kota dan kabupaten.

Populasi dan sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah adalah 19 kabupaten dan kota. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah bersifat *purposive* sampling yaitu seluruh kabupaten dan kota adalah digunakan sebagai unit analisis dalam kajian. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017-2023. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis panel data dengan menggunakan pilihan model empiris yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pool Least Square:

$$y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it} \quad ; (u_i = 0) \dots\dots\dots (1)$$

Fixed Effect Model:

$$y_{it} = (\alpha + u_i) + X_{it}\beta + v_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Random Effect Model:

$$y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + (u_i + v_{it}) \dots\dots\dots (3)$$

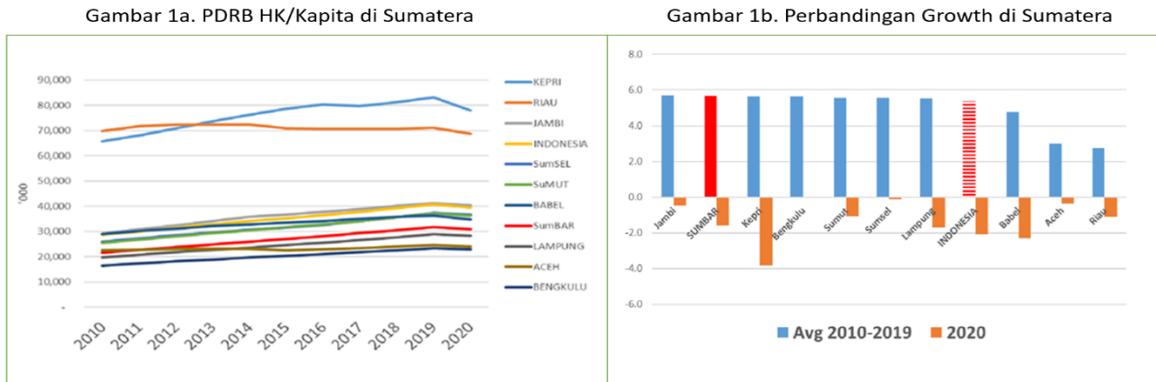
Dimana:  $y_{it}$  adalah depeden variabel yang terdiri dari tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan secara seri waktu di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sedangkan  $X_{it}$  adalah variabel instrumen kebijakan fiskal daerah yang terdiri dari *Local Taxing Power*, nilai pajak dan retribusi daerah kabupaten dan kota, nilai pajak provinsi dan nilai pajak pusat. Serta variabel Kontrol adalah *dummy* wilayah 1=daerah perkotaan dan 0 adalah lainnya.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Perkembangan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Secara umum, Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan kinerja yang kurang meyakinkan dalam 1 (satu) dekade terakhir. Sampai Kuartal 3 Tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat memiliki

share GDP untuk nasional adalah sebesar 1,50% (2024) dan 6, 72% (2024) untuk perekonomian di pulau Sumatera.

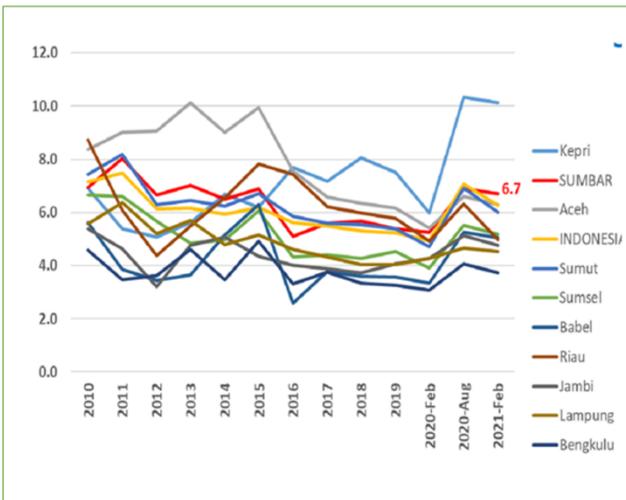


Sumber: BPS (2024)

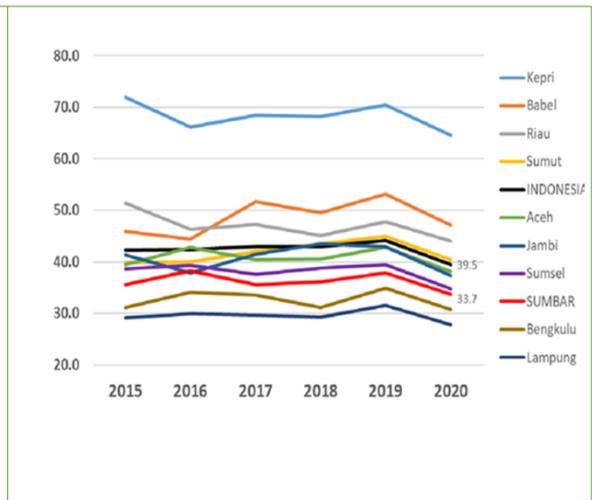
Selanjutnya, mencermati nilai PDRB per Kapita di Sumatera Barat berdasarkan harga konstan (2000) terlihat bahwa posisi Sumatera Barat berada pada kelompok terendah ke empat setelah Provinsi Bengkulu, Provinsi Aceh, dan Provinsi Lampung. Kondisi ini juga sangat berbeda dengan capaian PDRB/Kapita Riil yang dimiliki oleh daerah tetangga Sumatera Barat yaitu Provinsi Riau dan Riau Kepulauan yang memiliki PDRB/Kapita Riil tertinggi pertama dan kedua di pulau Sumatera.

Selanjutnya, Selama 2 dekade terakhir, Provinsi Sumatera Barat memiliki pertumbuhan ekonomi daerah yang tergolong biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sumatera. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun terlihat bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung mengalami perlambatan. Dari sisi produksi, Daerah ini mengalami de-agrikulturisasi dan de-industrialisasi. Sektor Ekonomi yang menopang pertumbuhan adalah sektor pertanian yang terlihat mengalami penurunan kontribusi dalam 10 tahun terakhir. Begitu juga di sektor Industri yang mengalami penurunan kinerja dalam 20 tahun terakhir.

Gambar 2a. Tingkat Pengangguran di Sumatera



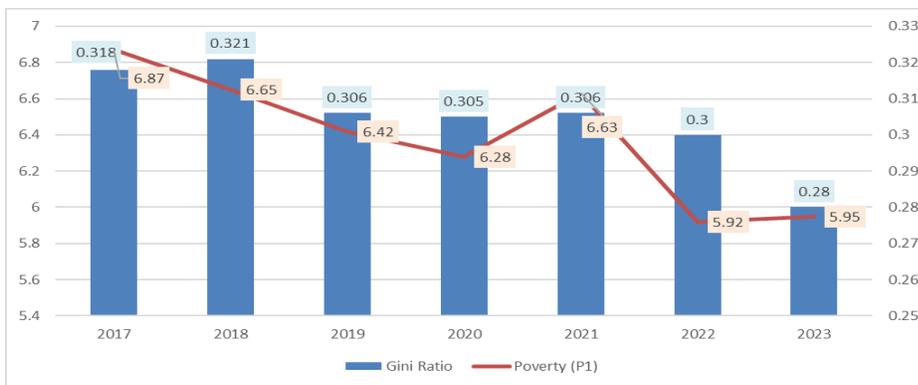
Gambar 2b. Pekerja Formal di Sumatera



Sumber: BPS (2024)

Sumatera Barat dalam 20 tahun terakhir juga menghadapi tingginya tingkat pengangguran dan memiliki kualitas tenaga kerja yang rendah. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, Sumatera Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua setelah Provinsi Kepulauan Riau. Berkenaan dengan kualitas ketenagakerjaan yang bekerja di Sumatera Barat, sampai dengan tahun 2020 memiliki proporsi pekerja formal dalam ketenagakerjaan Sumatera Barat adalah 33,3%. Artinya dua per tiga tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat adalah tenaga kerja informal.

Gambar 3. Gini Ratio dan Persentase Kemiskinan di Sumatera Barat

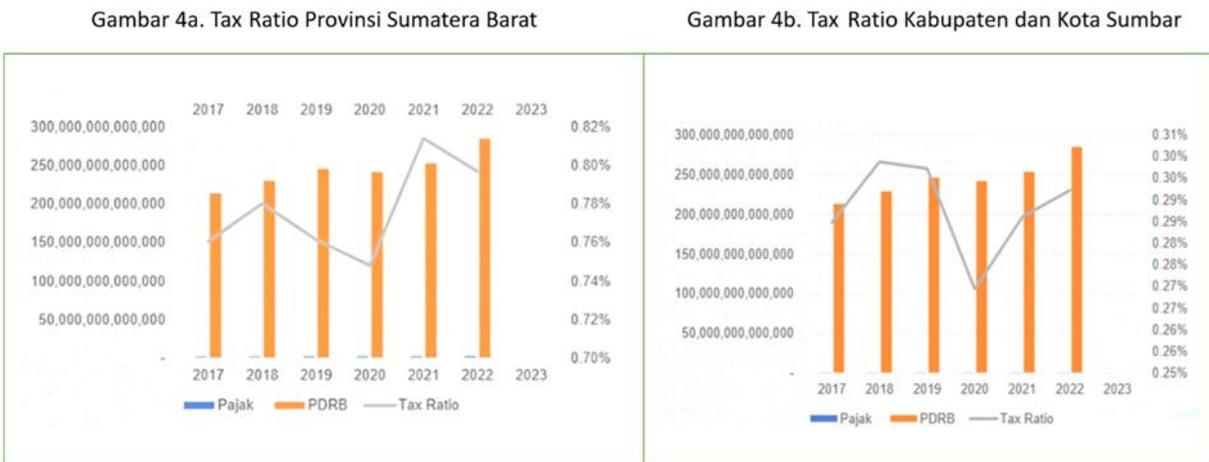


Sumber: BPS (2024).

Gambar 3 menjelaskan keterkaitan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Sumatera Barat 2017-2023. Terlihat bahwa selama periode tersebut ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat terus mengalami penurunan dan mengalami kondisi tertahan memasuki periode Covid 19 (2020-2021) dan kembali menurun pada tahun 2023. Kondisi yang sama juga memperlihatkan bahwa Kemiskinan penduduk yang terus menurun sejak 2017. Namun memasuki tahun 2021 (Pandemi Covid 19) mengalami kenaikan serta kembali turun tingkat kemiskinannya pada tahun 2022 dan 2023.

#### 4.2. Kinerja Fiskal Sumatera Barat

Salah satu indikator yang lazim digunakan dalam menentukan kinerja Fiskal adalah dengan menggunakan indikator *tax-ratio*. Gambar 4a dan 4b memperlihatkan bahwa perbandingan nilai pajak daerah dan PDRB di Kabupaten, Kota dan Provinsi di Sumatera Barat memperlihatkan angka yang tidak sebanding. Nilai pajak yang menjadi kewenangan dari masing-masing kabupaten, kota dan provinsi yang ada memperlihatkan nilai yang terlalu kecil.



Sumber: DJPb Provinsi Sumatera Barat (2024).

Untuk itu, diperlukan ukuran yang mampu menjelaskan kinerja pemerintah dalam mengakomodasi perekonomian untuk konteks kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah menggunakan *Local Taxing Power* (LTP). Masing-masing daerah memiliki nilai LTP yaitu total

pajak/Retribusi seluruh kewenangan baik kewenangan Kabupaten dan Kota, Kewenangan Provinsi, dan kewenangan pemerintah pusat di wilayah Kabupaten dan Kota bersangkutan.

#### 4.3. *Local Taxing Power* (LTC) dan Kesejahteraan Masyarakat

Berikut ini adalah ringkasan data statistik yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh *Local Taxing Power* (LTP) terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Statistik Data Kajian

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
Kabko_tax	133	38,900.00	84,200.00	2,650.00	488,000.00
Kabko_retri	133	8,290.00	10,700.00	922.00	48,700.00
Kabko_taxr~i	133	47,100.00	92,800.00	6,890.00	536,000.00
pdrb_hk	133	9.17	9.17	2.31	49.30
pdrb_hb	133	13.30	13.50	2.97	79.70
growth	133	3.60	3.08	(15.89)	6.83
unn	133	5.38	1.96	1.33	13.64
gini	133	0.28	0.03	0.19	0.39
pov	133	6.34	2.46	2.01	14.84
pus_tax	133	257,000	535,000	25,800	3,630,000
tax_bhprop	133	46,600	21,500	19,500	129,000
Est_taxprop	133	103,000	46,800	41,700	263,000

Sumber: Data diolah

Tabel 1 menjelaskan bahwa dengan menggunakan 133 observasi dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan durasi waktu adalah 2017-2023 memperlihatkan bahwa *variable* Kabko\_tax adalah menjelaskan nilai pajak yang dikelola masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Kabko\_retri adalah nilai retribusi yang di Kelola oleh masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Kabko\_taxr~i adalah nilai pajak dan retribusi yang di Kelola masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Selanjutnya juga dapat dijelaskan bahwa pdrb\_hk adalah nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto masing-masing kabupaten dan kota berdasarkan harga konstan dan pdrb\_hb adalah pendapatan domestik regional bruto Kabupaten dan Kota berdasarkan harga berlaku. Growth adalah pertumbuhan ekonomi, unn adalah *Un-Employment* (tingkat pengangguran penduduk), gini adalah nilai index gini masing-masing kabupaten dan kota, pov adalah

persentase kemiskinan penduduk, *pus\_tax* adalah nilai pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan *Est\_taxprop* adalah nilai estimasi besaran pajak provinsi.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Estimasi Regresi OLS, LSDV, FE dan RE

Variable	ols	lsdv	fe	re
<i>perc_ltp</i>	.53312164**	.68881684***	.03961804	.04326609
<i>Kabko_taxr~i</i>	-1.705e-11*	2.535e-11***	-9.926e-12*	-8.735e-12*
<i>pus_tax</i>	-6.139e-13	-3.004e-12**	5.996e-13	5.518e-13
<i>Est_taxprop</i>	3.218e-11***	-2.552e-11**	-1.548e-11***	-1.477e-11***
<i>_Ikota_1</i>		-5.3630703***		
<i>_cons</i>	1.7600698	7.6343693***	8.0787666***	7.9463102***
N	133	133	133	133
<i>r2</i>	.18775428	.56130238	.41592757	
<i>r2_a</i>	.16237161	.54403082	.29911309	

Legend: \*  $p < 0.05$ ; \*\*  $p < 0.01$ ; \*\*\*  $p < 0.001$

Sumber: Data diolah

Perbandingan hasil estimasi yang menjelaskan pengaruh LTP terhadap Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat bahwa secara umum nilai persentase LTP masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki kecenderungan dengan slop positif terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini dalam model estimasi OLS dan LSDV memperlihatkan nilai signifikan. Sedangkan dalam bentuk panel FE dan RE tidak signifikan.

Jika di uraikan masing-masing kewenangan yang ada dalam total nilai pajak yang ditarik di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa kewenangan pajak dan retribusi yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat secara signifikan mampu menurunkan tingkat kemiskinan penduduk. Hal ini dijelaskan dengan menggunakan model OLS, FE dan RE, sedangkan model LSDV menyatakan bahwa secara signifikan meningkatkan kemiskinan penduduk.

Selanjutnya, berdasarkan analisis model OLS dan LSDV menunjukkan bahwa nilai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat memberikan pengaruh untuk menurunkan kemiskinan penduduk di kabupaten dan kota di Sumatera Barat, namun secara signifikan adalah dengan

menggunakan LSDV nilai pajak yang dikelola pusat mampu menurunkan kemiskinan di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Selanjutnya, dengan menggunakan hasil estimasi LSDV, FE dan RE menunjukkan bahwa secara signifikan estimasi terhadap pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi di Sumatera mampu menurunkan kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Namun jika menggunakan metode OLS menunjukkan pengaruh sebaliknya yaitu meningkatkan kemiskinan secara signifikan di Sumatera Barat. Kemudian, jika dilakukan perbandingan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Sumatera Barat memperlihatkan kondisi bahwa wilayah perkotaan lebih mampu secara signifikan menurunkan kemiskinan di bandingkan dengan daerah wilayah pedesaan di Sumatera Barat.

Tabel 3. Perbandingan Hasil Pengujian Model

	— Coefficients —		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) fixed	(B) random		
perc_ltp	.039618	.0432661	-.0036481	.
Kabko_taxr~i	-9.93e-12	-8.73e-12	-1.19e-12	1.26e-12
pus_tax	6.00e-13	5.52e-13	4.78e-14	1.21e-14
Est_taxprop	-1.55e-11	-1.48e-11	-7.13e-13	.

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from **xtreg**.  
 B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from **xtreg**.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

$$\begin{aligned} \text{chi2}(1) &= (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B) \\ &= -0.16 \end{aligned}$$

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perbandingan pengujian model yang digunakan dalam analisis panel data dapat dijelaskan bahwa model yang paling relevan menggunakan data Kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh tingkat kemiskinan penduduk dan variabel independen adalah kinerja fiskal di Sumatera Barat dengan menggunakan berbagai uji statistik yang relevan termasuk Hausman Test diperoleh bahwa model yang relevan untuk data kajian ini adalah Model Panel *Fixed Effect* (FE)

## V. PENUTUP

Kajian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa pajak dan retribusi yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten dan kota beserta provinsi sangat menentukan sekali dalam mempengaruhi secara negatif kemiskinan penduduk. Beberapa catatan yang dapat diberikan adalah, pajak dan retribusi oleh pemerintah kabupaten dan kota adalah jenis pajak untuk kebutuhan masyarakat yang bersifat tersier dan lebih dikenakan kepada unit usaha dan bukan kepada perorangan. Untuk pajak provinsi yang didominasi oleh jenis pajak kendaraan bermotor negatif signifikan mempengaruhi kemiskinan penduduk adalah disebabkan oleh pajak tersebut langsung dikenakan kepada pemilik kendaraan. Hal ini dapat dipahami bahwa pemilik kendaraan yang ada di Sumatera Barat lebih didominasi keluarga non miskin di Sumatera Barat.

Kajian ini dapat merekomendasikan bahwa pemerintah perlu menyusun formulasi yang tepat agar LTP secara keseluruhan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dalam hal secara rinci pengelolaan pajak baik yang dilakukan pemerintah Kabupaten dan Kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, secara bersama-sama haru mampu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Namun hal ini belum sejalan kejadiannya dengan pajak yang dipungut pemerintah pusat yang secara positif meningkatkan kemiskinan penduduk di Sumatera Barat.

Keterbatasan utama yang dimiliki kajian ini adalah masih belum lengkapnya data yang digunakan terutama data pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pusat. Untuk itu kami menghadapkan perlunya akses data yang lengkap berkenaan dengan nilai pajak dan retribusi yang dikelola pemerintah provinsi dan pusat yang ada di masing-masing kabupaten dan kota yang merupakan unit analisis dari kajian ini. Selanjutnya saran yang dapat diberikan untuk kajian mendatang adalah perlunya presisi data yang akurat tentang nilai penerimaan pajak di masing-masing tingkat pemerintahan dan melihat hubungannya secara keseluruhan untuk indikator makroekonomi lainnya.

## KEPUSTAKAAN

- Suparta, I & Rizka Malia (2020) [Analisis Komparasi Happiness Index 5 Negara di Asean](#) *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Septianingrum, R, dkk (2020) [Economic inequality and its impact on human development: insight of Banten Province 2011-2015](#), *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 2020
- Franklien J.J dkk (2023). [PENGARUH DANA BAGI HASIL DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO](#)
- Ridho, MAK, (2022). [Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia](#). *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*.
- Pangestu, PP, dkk (2022). [Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Kalimantan Timur](#). *Edunomics Journal*
- Marlin, Helda, dkk (2022). [Revenue-Spend Hypothesis: Bukti Baru Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah](#) *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2022
- Indahsari, Devi Nur, Primandita Fitriandi (2021). [PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PPN](#). *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*
- Indra Maipita (2020). [SIMULASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA EKONOMI MAKRO: SUATU MODEL COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM](#). *Quantitative Economics Journal*
- Rusdiyantoro, Imam and Robert A. Simanjuntak (2022). [Kestinambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19](#). *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*

Lampiran

- Pooled Model (PLS) atau Common Effect Model

. reg pov perc\_ltp Kabko\_taxretri pus\_tax Est\_taxprop

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	133
Model	150.249709	4	37.5624273	F(4, 128)	=	7.40
Residual	649.996793	128	5.07809994	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.1878
				Adj R-squared	=	0.1624
Total	800.246502	132	6.0624735	Root MSE	=	2.2535

pov	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
perc_ltp	.5331216	.1690897	3.15	0.002	.1985488	.8676945
Kabko_taxretri	-1.71e-11	7.12e-12	-2.39	0.018	-3.11e-11	-2.95e-12
pus_tax	-6.14e-13	1.41e-12	-0.44	0.663	-3.40e-12	2.17e-12
Est_taxprop	3.22e-11	7.37e-12	4.37	0.000	1.76e-11	4.68e-11
_cons	1.76007	1.130106	1.56	0.122	-.4760385	3.996178

- Pooled Model (PLS) atau Common Effect Model by Control Variable

. reg pov perc\_ltp Kabko\_taxretri pus\_tax Est\_taxprop growth pop

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	133
Model	160.622493	6	26.7704155	F(6, 126)	=	5.27
Residual	639.624009	126	5.07638102	Prob > F	=	0.0001
				R-squared	=	0.2007
				Adj R-squared	=	0.1627
Total	800.246502	132	6.0624735	Root MSE	=	2.2531

pov	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
perc_ltp	.6722706	.1953702	3.44	0.001	.2856386	1.058903
Kabko_taxretri	-1.61e-11	7.16e-12	-2.25	0.026	-3.03e-11	-1.93e-12
pus_tax	-1.23e-12	1.47e-12	-0.84	0.404	-4.14e-12	1.68e-12
Est_taxprop	1.59e-11	1.36e-11	1.16	0.246	-1.11e-11	4.28e-11
growth	.0102863	.0638211	0.16	0.872	-.1160137	.1365863
pop	4.60e-06	3.23e-06	1.43	0.156	-1.78e-06	.000011
_cons	1.596719	1.153328	1.38	0.169	-.685684	3.879122

- Fixed Effects Model: (1). Model Least Squares Dummy Variable (LSDV)

. xi: regress pov perc\_ltp Kabko\_taxretri pus\_tax Est\_taxprop i.kota  
i.kota \_Ikota\_0-1 (naturally coded; \_Ikota\_0 omitted)

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	133
Model	449.180264	5	89.8360529	F(5, 127)	=	32.50
Residual	351.066238	127	2.76430109	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.5613
				Adj R-squared	=	0.5440
Total	800.246502	132	6.0624735	Root MSE	=	1.6626

pov	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
perc_ltp	.6888168	.1256506	5.48	0.000	.4401771	.9374566
Kabko_taxretri	2.53e-11	6.65e-12	3.81	0.000	1.22e-11	3.85e-11
pus_tax	-3.00e-12	1.06e-12	-2.83	0.005	-5.11e-12	-9.02e-13
Est_taxprop	-2.55e-11	7.77e-12	-3.28	0.001	-4.09e-11	-1.01e-11
_Ikota_1	-5.36307	.5157284	-10.40	0.000	-6.383604	-4.342537
_cons	7.634369	1.007135	7.58	0.000	5.641431	9.627308

- Fixed Effects Model: (1). Model Least Squares Dummy Variable (LSDV)

```
. xi: regress pov perc_ltp Kabko_taxretri pus_tax Est_taxprop i.kab_ko
i.kab_ko      _Ikab_ko_1-19      (naturally coded; _Ikab_ko_1 omitted)
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	133
Model	786.834247	22	35.765193	F(22, 110)	=	293.33
Residual	13.4122554	110	.121929595	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9832
				Adj R-squared	=	0.9799
Total	800.246502	132	6.0624735	Root MSE	=	.34918

	pov	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
	perc_ltp	.039618	.0441757	0.90	0.372	-.0479278 .1271639
Kabko_taxretri		-9.93e-12	3.97e-12	-2.50	0.014	-1.78e-11 -2.05e-12
	pus_tax	6.00e-13	3.24e-13	1.85	0.067	-4.22e-14 1.24e-12
Est_taxprop		-1.55e-11	2.39e-12	-6.48	0.000	-2.02e-11 -1.07e-11
	_Ikab_ko_2	-5.488774	.2694427	-20.37	0.000	-6.022746 -4.954802
	_Ikab_ko_3	-5.556514	.2569561	-21.62	0.000	-6.065741 -5.047288
	_Ikab_ko_4	-7.160783	.2369404	-30.22	0.000	-7.630343 -6.691222
	_Ikab_ko_5	-8.82932	.2572087	-34.33	0.000	-9.339048 -8.319593
	_Ikab_ko_6	-6.107913	.242195	-25.22	0.000	-6.587887 -5.62794
	_Ikab_ko_7	-6.389941	.2721224	-23.48	0.000	-6.929223 -5.850658
	_Ikab_ko_8	-6.573005	.2658552	-24.72	0.000	-7.099867 -6.046142
	_Ikab_ko_9	-6.705138	.2342963	-28.62	0.000	-7.169458 -6.240817
	_Ikab_ko_10	-6.992776	.2023215	-34.56	0.000	-7.39373 -6.591822
	_Ikab_ko_11	-7.601586	.2279256	-33.35	0.000	-8.053281 -7.149891
	_Ikab_ko_12	-6.336133	.2576501	-24.59	0.000	-6.846735 -5.825531
	_Ikab_ko_13	-4.413738	1.099101	-4.02	0.000	-6.591897 -2.235578
	_Ikab_ko_14	-11.39383	.2027249	-56.20	0.000	-11.79558 -10.99208
	_Ikab_ko_15	-12.40354	.1996883	-62.11	0.000	-12.79927 -12.0078
	_Ikab_ko_16	-9.065495	.2170443	-41.77	0.000	-9.495626 -8.635364
	_Ikab_ko_17	-9.153423	.300208	-30.49	0.000	-9.748365 -8.558481
	_Ikab_ko_18	-8.607161	.2212904	-38.90	0.000	-9.045706 -8.168615
	_Ikab_ko_19	-9.913938	.201506	-49.20	0.000	-10.31328 -9.5146
	_cons	15.3784	.36651	41.96	0.000	14.65206 16.10474

- Fixed Effects Model: (2). Entity-Specific Intercepts

```
. xtreg pov perc_ltp Kabko_taxretri pus_tax Est_taxprop , fe
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =      133
Group variable: kab_ko                 Number of groups =      19
```

```
R-squared:                               Obs per group:
  Within = 0.4159                          min =          7
  Between = 0.0033                          avg =         7.0
  Overall = 0.0062                          max =          7
```

```
corr(u_i, Xb) = -0.3958                    F(4,110)        =      19.58
                                          Prob > F         =      0.0000
```

	pov	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
	perc_ltp	.039618	.0441757	0.90	0.372	-.0479278 .1271639
Kabko_taxretri		-9.93e-12	3.97e-12	-2.50	0.014	-1.78e-11 -2.05e-12
	pus_tax	6.00e-13	3.24e-13	1.85	0.067	-4.22e-14 1.24e-12
Est_taxprop		-1.55e-11	2.39e-12	-6.48	0.000	-2.02e-11 -1.07e-11
	_cons	8.078767	.3092106	26.13	0.000	7.465984 8.69155
	sigma_u	2.7125642				
	sigma_e	.34918418				
	rho	.98369911	(fraction of variance due to u_i)			

```
F test that all u_i=0: F(18, 110) = 290.05      Prob > F = 0.0000
```

- Random Effects Model

```
. xtreg pov perc_ltp Kabko_taxretri pus_tax Est_taxprop , re
```

```
Random-effects GLS regression           Number of obs   =       133
Group variable: kab_ko                 Number of groups =        19

R-squared:                             Obs per group:
    Within = 0.4154                      min =          7
    Between = 0.0026                     avg =         7.0
    Overall = 0.0053                     max =          7

                                Wald chi2(1)   =          .
corr(u_i, X) = 0 (assumed)           Prob > chi2   =          .
```

	pov	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
	perc_ltp	.0432661	.0451077	0.96	0.337	-.0451434	.1316756
Kabko_taxretri		-8.73e-12	3.77e-12	-2.32	0.020	-1.61e-11	-1.35e-12
	pus_tax	5.52e-13	3.24e-13	1.70	0.088	-8.25e-14	1.19e-12
Est_taxprop		-1.48e-11	2.43e-12	-6.07	0.000	-1.95e-11	-1.00e-11
	_cons	7.94631	.6198286	12.82	0.000	6.731468	9.161152
	sigma_u	2.2741234					
	sigma_e	.34918418					
	rho	.97696646	(fraction of variance due to u_i)				

- Perbandingan Analisis

```
. estimates table ols lsdv fe re, star stats(N r2 r2_a)
```

Variable	ols	lsdv	fe	re
perc_ltp	.53312164**	.68881684***	.03961804	.04326609
Kabko_taxr~i	-1.705e-11*	2.535e-11***	-9.926e-12*	-8.735e-12*
pus_tax	-6.139e-13	-3.004e-12**	5.996e-13	5.518e-13
Est_taxprop	3.218e-11***	-2.552e-11**	-1.548e-11***	-1.477e-11***
_Ikota_1		-5.3630703***		
_cons	1.7600698	7.6343693***	8.0787666***	7.9463102***
N	133	133	133	133
r2	.18775428	.56130238	.41592757	
r2_a	.16237161	.54403082	.29911309	

Legend: \* p<0.05; \*\* p<0.01; \*\*\* p<0.001

- Pengujian memilih model terbaik: FEM atau REM

```
. hausman fixed random
```

Note: the rank of the differenced variance matrix (1) does not equal the number of coefficients being tested (4); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the test. Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

	Coefficients			sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) fixed	(B) random	(b-B) Difference	
perc_ltp	.039618	.0432661	-.0036481	.
Kabko_taxr~i	-9.93e-12	-8.73e-12	-1.19e-12	1.26e-12
pus_tax	6.00e-13	5.52e-13	4.78e-14	1.21e-14
Est_taxprop	-1.55e-11	-1.48e-11	-7.13e-13	.

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from **xtreg**.  
 B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from **xtreg**.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

chi2(1) = (b-B)'[(V\_b-V\_B)^(-1)](b-B)  
 = -0.16

Warning: chi2 < 0 ==> model fitted on these data fails to meet the asymptotic assumptions of the Hausman test; see **suest** for a generalized test.